

GERAKAN PROTES MASYARAKAT SITUBONDO MASA AKHIR PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID TAHUN 2001

“Situbondo Public Protests Last Day Of 2001 Abdurrahman Wahid”

Achmad Zainuri, Sunarlan, SS.,M.Si
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jl, Kalimantan 37, Jember 68121
Email : Yek.Nuri@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang gerakan protes kaum *nahdliyin* Situbondo. Pelengseran Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang dilakukan oleh poros tengah telah menimbulkan ketersinggungan dan sekaligus solidaritas dikalangan NU, sehingga telah menimbulkan aksi protes yang di ikuti adanya pengrusakan dan pembakaran gedung, penebangan pohon di pinggir jalan raya, dan blokade jalan di sepanjang jalan pantura dari Surabaya sampai Banyuwagi, yang mengakibatkan kemacetan panjang selama beberapa hari. Penulisan ini menggunakan teori konflik karena adanya hubungan sosial yang dilakukan oleh individu dan kelompok. Metode yang dilakukan penulis adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Kata kunci : Abdurrahman Wahid, konflik, NU, poros tengah.

ABSTRACT

This article explains about the Nahdliyin public protest movement in Situbondo. Abdurrahman Wahid as president ouster conducted by the central axis has caused offense and at the same solidarity among NU, so that has caused protests in actionable follow to the destruction and burning of buildings, felling trees on the roadside, and roadblocks along the coast road from Surabaya to Banyuwagi, which resulted in long traffic jams for several days. This study is using the theory of social conflict because of the existence of social relations made by individuals and groups. The method that used of the author is the historical method which consists of four stages involve heuristic, source criticism, interpretation, and histeriography.

Keyword : Abdurrahman Wahid, conflict, NU, sentral poros.

1. PENDAHULUAN

Sejak Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden, secara tidak langsung memberikan posisi kuat dalam perpolitikan nasional maupun daerah bagi pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB merupakan partai yang dianggap sebagai wadah bagi penyaluran aspirasi politik bagi massa Nahdhatul Ulama. Para pendukung PKB menganggap Abdurrahman Wahid sebagai simbol kemenangan warga *nahdhiyin* (pendukung massa Nahdhatul Ulama), sehingga dalam anggapan para pendukung PKB menjelekan atau menyakiti Abdurrahman Wahid sama juga menyakiti warga *nahdhiyin*. Hal ini yang menjadi dasar bagi gerakan protes masyarakat Situbondo pada akhir masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Daerah Situbondo seperti yang diketahui merupakan daerah pendukung PKB yang kuat. Latar belakang kebudayaan yang bercorak Madura menyebabkan daerah ini menjadi kantong kaum *nahdhiyin* yang fanatik terhadap Abdurrahman Wahid sebagai presiden. (Majalah Tempo, 26, 01, 2001)

Perseteraan Abdurrahman Wahid dengan DPR/MPR yang dimulai dengan kebijakan-kebijakan presiden yang dinilai sangat kontroversial dan dilanjutkan dengan tuduhan adanya kasus dugaan korupsi yang melibatkan presiden dianggap masyarakat Situbondo sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol kepemimpinan yang mereka hormati. Abdurrahman Wahid bagi pandangan masyarakat Situbondo tidak saja dianggap sebagai presiden, tetapi juga sebagai kiai yang menjadi panutannya. Di tambah lagi dengan upaya pelengseran Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan melalui keputusan Sidang Istimewa yang diprakarsai ketua DPR/MPR Akbar Tanjung/Amien Rais secara tidak langsung dianggap masyarakat Situbondo sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol kiai yang mereka hormati. (Majalah Tempo, 10, 02, 2001). Berdasarkan hal tersebut ada korelasi antara persetujuan Abdurrahman Wahid melawan DPR/MPR dengan gerakan protes masyarakat Situbondo, di mana masyarakat memaknai gerakan mereka sebagai bentuk pembelaan akan harga diri mereka atas pelecehan terhadap guru (kiai) yang menjadi panutannya.

Berdasarkan atas konsep pembelaan terhadap harga diri ini, masyarakat *nahdhiyin* Situbondo bergerak menunjukkan kekecewaan

terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pemicu pelecehan. Gerakan protes masyarakat Situbondo ini dimulai dengan aksi penggalangan massa dan mengirimkan ke Surabaya untuk berpartisipasi dalam menuntut pembubaran panitia khusus *bulogate* dan *bruneigate* yang dinilai melecehkan Abdurrahman Wahid. Demonstrasi ini berlangsung hingga terjadi insiden pembakaran gedung DPC Golkar di Surabaya oleh massa pendukung Abdurrahman Wahid. Pasca terjadinya insiden pembakaran gedung DPC Golkar suhu politik di pusat semakin memuncak dan pihak Golkar yang diwakili ketua DPR Akbar Tanjung menuntut Abdurrahman Wahid untuk bertanggung jawab. Perseteruan semakin melebar hingga muncul memorandum I dan II. (Kompas 09, 03, 2001) Hal ini semakin memperkuat kemarahan massa di Situbondo atas arogansi ketua DPR Akbar Tanjung. Hal ini kemudian memicu gerakan *tumpas kelor* yaitu menumpas habis partai Golkar yang dianggap sebagai representasi dari rezim Orde Baru. Gerakan ini kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain di Jawa Timur.

Kejengkelan masyarakat Situbondo semakin memuncak ketika mendengar *issue* adanya Sidang Istimewa yang mengarah pada penurunan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Mereka menilai SI sebagai bentuk pengkhianatan ketua MPR, Amien Rais terhadap janji yang diberikan kepada Kiai Faqih. Massa kembali bergejolak dengan semakin santernya *issue* SI yang ingin men dongkel Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Masyarakat akhirnya berkumpul di Ponpes Salafiah Safiah dengan menggelar 1000 tanda tangan di atas kain sebagai bentuk penolakan adanya SI. Tidak puas dengan itu massa kemudian menumpahkan kejengkelannya dengan menebang pohon-pohon di pinggir jalan dan memutuskan jalur yang menghubungkan Surabaya-Banyuwangi. Akibatnya jalur darat pantai utara terputus dengan daerah-daerah lain selama sehari-hari, sehingga perekonomian di daerah sekitar jalur pantai utara mengalami kelumpuhan. Sebagai bentuk kejengkelannya massa menghancurkan gedung DPC Situbondo dan institusi milik Muhammadiyah yang menjadi representasi Amien Rais dan Akbar Tanjung. (Panji Masyarakat, 19, 02, 2001).

Untuk melihat secara jelas apa yang terjadi dalam gerakan protes tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi-

politik. Sosiologi politik digunakan sebagai alat untuk mendekati permasalahan gerakan protes masyarakat Situbondo. Menurut Maurice Duverger, pendekatan sosiologi politik merupakan pendekatan mengenai kekuasaan, pemerintah, otoritas, dan komando dalam semua bentuk masyarakat. Di dalamnya terdapat suatu pola hubungan antara kelas yang memerintah (*govermen*) dan kelas yang diperintah (*non-govermen*), atau yang membuat keputusan dan yang mentaati keputusan. Sosiologi politik mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam setiap gerak aktivitas kehidupan masyarakat mempunyai relevansi dengan arah formal yang dijalankan oleh pemerintah.

Ruang lingkup artikel ini meliputi scop spasial yakni Situbondo yang terletak di daerah ujung timur pulau Jawa yang menjadi tempat gerakan protes tersebut. Sedangkan scop temporal pada tahun 2001 dengan pertimbangan bahwa telah terjadi kerusuhan di Situbondo.

Rumusan masalah dari tulisan ini adalah (1) apa yang melandasi terjadinya gerakan protes tersebut, (2) apakah gerakan protes masyarakat Situbondo ada kaitannya dengan perseteruan antara Abdurrahman Wahid dengan MPR/DPR (3) bagaimana bentuk protes yang dilakukan masyarakat Situbondo (4) bagaimana akhir dari protes gerakan tersebut. Sumber sejarah di klasifikasikan menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dengan mata kepala sendiri atau kesaksian langsung yang dapat terekam dalam alat mekanis yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan. Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan (1986:35).

2. Kondisi Sosial Politik Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Berbicara mengenai pemerintahan Abdurrahman Wahid sebenarnya merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dan mewarisi persoalan-persoalan sosial politik yang belum terselesaikan pada masa sebelumnya, sehingga berbagai krisis yang muncul pada masa pemerintahannya perlu mendapat penanganan

secara serius. Krisis-krisis yang melanda Indonesia antara lain seperti krisis ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Krisis politik berkaitan dengan permasalahan demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa.

Krisis hukum berkaitan dengan pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya, kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif), namun pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, pengadilan sangat sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat, karena hakim harus melayani kehendak penguasa. Bahkan hukum sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah. Seringkali terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabat atau para pejabat Negara. (M. AS Hikam (dkk.), 1999: 34).

Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan likuidasinya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Dalam perkembangan berikutnya, nilai rupiah melemah dan menembus angka Rp 10000,- per dollar AS. Kondisi ini semakin diperparah oleh para spekulasi valuta asing baik dari dalam maupun luar negeri yang memanfaatkan keuntungan sesaat, sehingga kondisi ekonomi nasional semakin bertambah buruk. (Kompas, 1998)

Sejak berakhirnya kekuasaan Soeharto dan naiknya Habibie sebagai presiden, daerah-daerah Indonesia mengalami gejolak hebat dan di antaranya berusaha melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor-Timor, Aceh, Maluku, dan Irian Jaya adalah sebagian dari daerah-daerah yang bergejolak. (Sinansari Ecip:

54) Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor peranan militer begitu penting, sehingga di mata dunia Internasional Indonesia mendapat ranting yang cukup tinggi bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). (Laporan ICG Asia N°9, 2000: 11). Berbagai gejolak sosial bagi pemerintah Indonesia merupakan permasalahan yang membutuhkan penanganan serius agar kesatuan negara tetap terjaga. Kondisi yang demikian ini dihadapi oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid, sehingga untuk menyelesaikan semuanya membutuhkan energi maksimal dan waktu yang lama. (Budiman, Arief dan Olle Tornquist, 2001: 34).

Pada awal pemerintahannya, Abdurrahman Wahid masih didukung oleh poros tengah, Golkar, TNI/Polri, dan berbagai kalangan simpatisannya. Legitimasi politik dan sosial ketika itu masih terasa cukup kuat di tangan Abdurrahman Wahid. Setelah melewati tiga bulan pertama, Abdurrahman Wahid mulai digoyang oleh pendukungnya, terutama oleh poros tengah di bawah komando Amien Rais. Kabinet yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan Kabinet Persatuan Nasional merupakan koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik dan Non-partisan, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan (PK), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Abdurrahman Wahid kemudian mulai melakukan pembekuan terhadap lembaga pemerintahan, yaitu membubarkan Departemen Penerangan yang selama rezim Orde Baru menjadi senjata utama bagi Soeharto dalam menguasai media, dan membubarkan Departemen Sosial yang menjadi sarang bagi korupsi. (Greg Barton, 2010: 290)

Pembubaran Departemen Penerangan ditanggapi baik oleh pers dan media, tetapi menimbulkan keresahan di kalangan karyawan dan politisi yang kemudian akhirnya banyak anggota DPR mempertanyakannya. Dalam sidang paripurna DPR, Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa pembubaran itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan sekaligus untuk melaksanakan UU No. 2 tentang Otonomi Daerah. Akan tetapi, alasan yang paling mendasar pembubaran Departemen Penerangan adalah agar

kebebasan pers lebih terjamin dalam Negara Indonesia, karena selama ini departemen ini menjadi alat bagi pembredelan pers yang dianggap kurang mendukung pemerintah. Pembubaran Departemen Sosial dimaksudkan agar rakyat ikut berperan aktif dalam pelayanan sosial dan tidak hanya mengandalkan pada pemerintah. Menurut Abdurrahman Wahid, pelayanan sosial tidak hanya menjadi kewajiban bagi pemerintah, rakyat juga perlu terlibat dalam proses tersebut. Namun, alasan yang paling mendasar adalah karena departemen ini menjadi sarang yang paling besar dalam ajang korupsi dana bantuan sosial. (Nur Khalik Ridwan, 2010: 362).

Selama akhir tahun 1999 sampai pertengahan tahun 2000 aktivitas pemerintahan Abdurrahman Wahid diisi dengan perjalanannya ke berbagai negara-negara di Benua Eropa, Asia, dan Afrika dan mengkonsolidasikan daerah-daerah Indonesia yang sedang bergolak, seperti memberikan Aceh referendum berupa otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timur Timur. Melakukan pendekatan yang lebih bijaksana terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember 1999, Abdurrahman Wahid mengunjungi Irian Jaya dan mendorong serta meyakinkan pemimpin-pemimpinnya untuk menggunakan nama Papua bagi daerah ini.

Kabinet Persatuan Nasional merupakan kabinet dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid, namun belum genap berumur satu bulan umur kabinet ini salah satu menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya. Ada dugaan bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. (Greg Barton, 2010: 290) Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Abdurrahman Wahid terhadap Israel. (J.F Conceicao, 2005: 15).

Seperti yang diketahui bahwa permasalahan negara yang paling mendesak pasca terjadinya gejolak sosial pada masa reformasi adalah perbaikan ekonomi negara. Abdurrahman Wahid dan para pendukungnya menyatakan bahwa

pemulihan krisis moneter dan ekonomi tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, karena pemerintahannya hanya mewarisi segala kebobrokan ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan oleh rezim Orde Baru selama 32 tahun. Oleh karena itu, menjadi hal yang kurang etis jika menuntut perbaikan keuangan dan ekonomi dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat yang sama, pemerintahan Abdurrahman Wahid dihadapkan pula pada masalah keamanan yang dipicu oleh berbagai konflik yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) seperti kasus Ambon, Poso, Aceh, Pontianak, dan Sampit yang sulit diatasi dengan cepat. Salah satu kebijakan yang diambil Abdurrahman Wahid dalam perbaikan ekonomi adalah mengagendakan untuk membuka hubungan dagang dengan Israel.

Agenda pembukaan hubungan dagang dengan Israel ini dimaksudkan untuk mendongkrak sektor ekonomi Indonesia yang sedang ambruk yang diwarisi dari produk rezim Orde Baru, dan juga sebagai alat untuk mengartikulasikan secara langsung dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina kepada Israel. Artinya dengan adanya hubungan ini Abdurrahman Wahid ingin mempengaruhi dan mendekonstruksi pemikiran stereotip negatif terhadap komunitas Yahudi yang terbentuk sebagai hasil dari kontruksi sosial masa lalu, untuk kemudian mengorientasikannya pada realitas era pasca rekonsiliasi Palestina-Israel.

Rencana ini spontan mendapat respon yang sangat luar biasa dari berbagai elemen masyarakat politik, karena dari sisi agama dinilai tidak etis jika pemerintah Indonesia tetap melanjutkan hubungan dagang, sementara Israel sedang melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat Palestina yang notabene sama-sama beragama Islam dengan rakyat Indonesia. Penolakan sebagian masyarakat terhadap rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel membuat Abdurrahman Wahid bergeming, ketika kalangan Islam bereaksi keras. Demonstrasi menentang pembukaan hubungan dagang itu merupakan jawaban atas ketidaksetujuan elemen dari kalangan Islam. Menanggapi permasalahan ini Abdurrahman Wahid hanya berkomentar, “lucu jika Indonesia membuka hubungan dengan RRC, Korea Utara, dan sebagainya, itu anda biarkan. Mereka terang-terangan Atheis, menentang

Tuhan.” Walaupun rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel tidak dapat direalisasikan, rencana ini telah menimbulkan respon dari kalangan investor asing. George Soros, misalnya, sudah mulai memasok dan untuk kegiatan investasi di beberapa sektor industri, diantaranya melalui pembelinya atas bagian terbesar dari saham industri automotif terkemuka Astra, serta kedatangan Henry Kissinger ke Jakarta tanggal 28 Februari 2000 juga mengisyaratkan adanya respon tersebut. (Panji, 2000: 53)

Masalah kebijakan, menurut penilaian masyarakat politik Abdurrahman Wahid seringkali mengeluarkan statemen yang bersifat kontroversial dan pada ujung-ujungnya menuai protes dari elemen masyarakat. Misalnya adalah kebijakannya yang mengusulkan pencabutan ketetapan MPRS No. XXV/1966 tentang larangan penyebaran ajaran Komunisme, Leninisme, dan Marxisme di Indonesia. Sejak peristiwa kudeta tahun 1965, paham Komunisme, Leninisme, dan Marxisme menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan baik dalam masyarakat akademis maupun politik. Usulannya ini secara tidak langsung menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat dan partai politik. Dalam acara wisuda sarjana dan Dies Natalis ke-19 Universitas Islam Negeri Malang, Jawa Timur, pada tanggal 25 Maret 2000, Abdurrahman Wahid menegaskan dengan menyatakan “saya secara pribadi setuju penghapusan ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966. Alasannya, ya karena terlalu banyak orang-orang yang sebenarnya ndak komunis, lalu masuk dalam daftar itu”. (Panji, 2000: 53) Peristiwa lainnya adalah pemecatan Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi dari kabinet pemerintahannya. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun ia tidak pernah memberikan bukti yang kuat. (Greg Barton, 2010: 302) Hal ini memperburuk hubungan Abdurrahman Wahid dengan Golkar dan PDI-P.

3. Penggalangan Massa

Berawal dari sebuah issue dugaan kasus korupsi bulogate dan dana bantuan Sultan Brunei yang ditengarai melibatkan presiden suasana sosial politik pada masa akhir pemerintahan

Abdurrahman Wahid mulai memanas. Para pendukung Abdurrahman Wahid di Situbondo terpengaruh oleh pernyataan para politisi di Jakarta yang kemudian membuat ketegangan sosial politik di daerah-daerah kantong pendukung Abdurrahman Wahid semakin meningkat. Para pendukung Abdurrahman Wahid di Situbondo tidak terima dengan semua tuduhan dugaan korupsi yang dilontarkan oleh ketua DPR Akbar Tanjung terhadap Abdurrahman Wahid. Hal ini secara tidak langsung dimaknai oleh masyarakat Situbondo dari kalangan nahdhiyin sebagai pelecehan atas simbol kekiaian Abdurrahman Wahid yang mereka hormati. Bagi kaum nahdhiyin Situbondo Abdurrahman Wahid tidak saja dipandang sebagai presiden, tetapi juga sebagai kiai yang menjadi simbol panutan mereka.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2, dalam kultur NU, kiai menduduki posisi dan peran yang sangat penting. Kiai telah ditasbihkan sebagai pemegang otoritas moral, pembawa “pesan langit”, dan label surgawi lainnya. dalam struktur PKB, kiai ditempatkan dalam posisi Dewan Syuro, lembaga perumus kebijakan tertinggi partai sekaligus pemegang otoritas moral untuk mengawasi pergerakan politik dalam upaya menggapai politik cita-cita PKB. Kentalnya kultur dalam masyarakat Situbondo menjadikan mereka memandang kiai sebagai figur pemimpin dalam segala bidang. Ada tiga kelompok yang dianggap sebagai panutan masyarakat, yaitu; santri, kiai dan haji. Pada dasarnya semua bentuk kepemimpinan ini didasarkan pada pengetahuan yang mendalam tentang Islam menjadikan mereka paling terdidik di desa. Beberapa kiai selain tetap menyampaikan keahliannya soal-soal agama, juga dapat meramalkan nasib, menyembuhkan orang sakit dan mengajar olah kanuragan. Kiai dalam masyarakat Situbondo dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu; guru ngaji, yang mengajarkan al-Qur’an, guru ngaji kitab yang mengajarkan berbagai jenis ilmu agama, dan guru tarekat yang disebut juga pemimpin tarekat. (A. Latief Wiyata, 2008: 333).

Peranan kiai di Situbondo sangat penting, dan orientasi masyarakat Situbondo adalah kiai, tidak pada kepemimpinan birokrasi. (Kuntowijoyo, 1993: 83).

Pandangan ini yang kemudian dimaknai sebagai motor penggerak dalam setiap acara perhelatan politik. Sebagaimana masyarakat patrimonial yang memegang teguh hierarki, posisi kiai sebagai pemimpin keagamaan dalam masyarakat Situbondo menjadi sangat kuat. Kekuasaan sosial terpusat pada tokoh-tokoh yang secara tradisional keberadaannya sangat dibutuhkan untuk mempersatukan mereka, bukan karena dipaksakan maupun keinginan para tokohnya. Dalam konteks inilah, yang pada awalnya peran kiai hanya menyempit dalam area keagamaan, kemudian melebar ke kawasan sosial dan bahkan politik. Selain itu, masyarakat Situbondo melihat kiai sebagai cerminan pimpinan yang diungkapkan dalam pribahasa mereka “bhuppa’ bhabbu’ ghuru rato. Pandangan ini menyangkut filosofi kepatuhan masyarakat Situbondo terhadap bapak, ibu, guru dan raja (pemimpin formal), yang mereka sebut sebagai figur-figur utama. (A. Latief Wiyata, 2008: 04)

Kehidupan sosial budaya masyarakat Situbondo terdapat standard referensi kepatuhan terhadap figur-figur utama secara hirarkikal. Sebagai aturan normatif yang mengikat kepada semua masyarakat Situbondo, maka palanggaran atau paling tidak melalaikan aturan itu akan mendapat sangsi sosial secara kultural. Kepatuhan kepada guru merupakan aturan yang sangat normatif yang menjadi dasar bagi setiap makhluk di dunia. Bagaimana dengan kepatuhan kepada guru di Madura? Pada tataran ini Wiyata lebih menggarisbawahi bahwa tidak semua masyarakat dapat mematuhi guru sekuat masyarakat Situbondo. Bagi orang Situbondo, guru (kiai) merupakan jaminan masalah moralitas dan masalah-masalah ukhrawi, maka kepatuhan masyarakat Situbondo kepada guru didasarkan pada alasan tersebut. Selain itu, masyarakat

Situbondo yang berkultur Madura diakui memiliki perangai, sikap dan prilaku yang sangat tegas kemudian terimplementasikan dalam perangai, sikap, prilaku spontan dan ekspresif kadangkala muncul dalam takaran yang agak berlebihan sehingga makna ketegasan yang terkandung di dalamnya kemudian bergeser menjadi "kekerasan". Namun, pergeseran ini tidak mungkin terjadi tanpa ada kondisi-kondisi yang membentuknya. Kondisi sosial-budaya yang paling kuat adalah ketika orang Madura merasa dilecehkan harga dirinya sehingga membuatnya tada'ajinah (pengingkaran terhadap eksistensi diri sehingga tidak berguna dan bermanfaat baik secara sosial maupun budaya). (Mien Ahmad Rifa'i, 2007: 108)

4. Gerakan Tumpas Kelor

Pada saat dua hari setelah keluarnya memorandum dan untuk menanggapi pernyataan Amien Rais, pada tanggal 3 Februari 2001 ribuan massa pendukung Abdurrahman Wahid dari wilayah-wilayah sekitar Besuki, Pasirputih, Situbondo, dan Asembagus turun ke jalan-jalan. Secara spontan massa pendukung Abdurrahman Wahid menebangi tak kurang dari seratus pohon di pinggir jalan. Aksi yang dipicu oleh situasi politik di Jakarta, tepatnya di Gedung MPR/DPR yang pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2001 mengeluarkan memorandum terhadap Abdurrahman Wahid. Massa pendukung Abdurrahman Wahid yang menumbangkan pohon-pohon itu marah besar kepada para wakil rakyat di Jakarta. Aksi penumbangan pohon ini terutama terjadi di ibukota Kecamatan Kapongan sampai Banyuputih, sejauh kurang lebih 50 km. Mereka lalu meletakkan kayu-kayu itu untuk membarikade jalan, sehingga tidak memungkinkan kendaraan-kendaraan untuk lewat dan membuat lalu lintas pantura dari Surabaya menuju Banyuwangi macet total selama lebih dari 24 jam. Dalam aksi ini, para pengunjuk rasa membawa poster dan meneriakkan sejumlah tuntutan, antara lain: bubarkan Golkar, bubarkan Pansus, dan cabut memorandum. Lalu lintas baru normal hari Minggu pagi tanggal 4

Februari, pukul 09.00, setelah polisi dan anggota TNI AD yang dibantu masyarakat menyingkirkan batang-batang pohon yang malang melintang di tengah jalan. Aksi spontan masyarakat Situbondo ini dapat diartikan sebagai bentuk protes terhadap para politisi yang hendak merongrong kewibawaan pemerintah Abdurrahman Wahid. (Tempo Interaktif, 3, 02, 2001)

Sejak Minggu siang, suasana di sekitar Situbondo normal dan masyarakat menjalankan kesehariannya seperti biasanya. Namun, hari Senin tanggal 5 Februari 2001, suasana di sekitar Situbondo kembali bergejolak. Ribuan massa pendukung Abdurrahman Wahid kembali berunjuk rasa. Mereka kembali menebangi sejumlah pohon di jalur lintas pantai utara Kabupaten Situbondo. Jumlah pohon yang ditebang, menurut keterangan Kepala Polisi Resor (Polres) Situbondo, Ajun Komisaris Besar Putut Eko Bayuseno, berjumlah 63 batang. Rinciannya di Kecamatan Mlandingan 39 pohon, Kecamatan Subo 12 pohon, Banyuglugur 6 pohon, Jangkar 1 pohon, dan di Kota Situbondo sendiri berjumlah 5 pohon. Imbas penebangan pohon tersebut, jalur lintas Pantura kembali terhambat, mulai dari Kecamatan Banyuglugur hingga Kecamatan Asembagus. Baru pada pukul 16.25 pohon-pohon yang melintang di jalan-jalan itu bisa disingkirkan dan lalu lintas kembali lancar. Menanggapi aksi yang terjadi, Kepala kepolisian Wilayah (Polwil) Besuki Komisaris Besar Untung Suharsono Radjab, menyatakan bahwa situasi masih terkendali. Oleh karena itu, ia mengharapkan semua warga agar tidak panik. Untuk mengantisipasi keadaan, jelas Untung, Polwil Besuki dan Brigade Mobil juga mengirim bantuan pasukan ke Polres Situbondo, masing-masing satu kompi. Selain itu, pihak kepolisian menggerakkan semua komponen masyarakat, termasuk alim ulama, untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap keamanan di Situbondo. Aksi ini, jelas Untung, sesungguhnya merupakan gerakan moral. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak berunjuk rasa

dengan merusak atau melakukan kegiatan anarkis yang merugikan masyarakat. “Apabila dilakukan dengan anarkis, aksi yang sesungguhnya merupakan gerakan moral ini akan menjadi kegiatan tidak bermoral,” ujar Untung.

Sementara itu, tokoh ulama Situbondo KH. Achmad Fawaid As’ad turut menyesalkan terjadinya aksi massa ini. “Kami sama sekali tidak menginginkan kejadian seperti ini” katanya. Di sisi lain, menurut Fawaid, para kiai dan ulama sejak jauh hari juga telah mengingatkan elite politik akan kemungkinan terjadinya aksi seperti ini. Akan tetapi, peringatan para kiai itu tidak pernah diperhatikan. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo Aqiq Zaman mengharapkan terjadinya penurunan suhu politik di Jakarta. Ia juga mengharapkan semua pihak untuk kembali pada konstitusi, mendukung pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid sampai 2004. Diharapkan, DPR di pusat juga tidak hanya menjadi penonton dan mencari celah-celah kesalahan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang menanggung beban sangat besar. Akan tetapi, ikut duduk bersama-sama dalam satu meja mengatasi berbagai permasalahan bangsa. “Aksi ini juga bisa menjadi pelajaran bagi DPR di pusat untuk tidak macam-macam karena terbukti bahwa gejolak di Jakarta dampaknya akan dirasakan di daerah. Di Jakarta, mereka menerima 'aromanya', sementara yang di daerah kebagian paniknya,” tegas Aqiq. Aqiq menilai, aksi massa terjadi sebagai reaksi spontan masyarakat karena melihat potongan-potongan informasi dari media elektronik. Mungkin ada yang melihat, bagaimana media elektronik dijadikan alat propaganda kelompok tertentu. Oleh karena itu, ia juga mengharapkan jajaran pers untuk menyampaikan informasi dengan jernih.

Gerakan aksi kerusuhan yang dilakukan oleh massa pendukung Abdurrahman Wahid merupakan awal dari gerakan yang anti Golkar yang oleh masyarakat diistilahkan dengan “gerakan tumpas kelor”. Di tengah suasana tegang ini tersebar issue

bahwa massa pendukung Abdurrahman Wahid akan menggelar aksi demonstrasi di DPRD Situbondo. suasana mencekam melanda masyarakat Situbondo. Peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi tahun 1996 masih membekas dalam masyarakat, terutama bagi kaum Tionghoa, sehingga kota Situbondo begitu lengang. Banyak toko-toko di berbagai kecamatan Situbondo milik orang Tionghoa tidak berani membuka dagangannya. Mereka lebih memilih menutup diri dan bersembunyi di dalam rumah. Jalan-jalan yang mengarah ke kota Situbondo terlihat lengang. Sekolah-sekolah terpaksa diliburkan untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan. Sejak pagi aparat kepolisian sudah disiagakan menjaga terjadinya kerusuhan.

Hari Selasa pagi tanggal 6 Februari 2001 ketegangan sosial politik di daerah Situbondo semakin memuncak. Sejak pukul 07.30 WIB sudah berkumpul di Kota Situbondo. Massa pendukung Abdurrahman Wahid dari berbagai daerah Situbondo berbondong-bondong mendatangi kantor DPRD Situbondo dengan perlengkapan, seperti golok, clurit, gergaji, kapak, dan poster. Massa NU meneriakkan tuntutan pencabutan memorandum dan pelarangan partai Golkar di Situbondo. Berbagai poster dan spanduk yang bertuliskan: Bubarkan Golkar!; Bubarkan DPR!; Gus Dur Mundur Negara Hancur!; Gus Dur Dipaksa Mundur, Jatim Jadi Negara! digelar oleh massa pendukung Abdurrahman Wahid dan mencaci maki para politisi dari Golkar dan PAN yang dinilai sebagai dalang perongrongan kewibawaan pemerintah Abdurrahman Wahid. Massa pendukung Abdurrahman Wahid menuntut para praktisi politik dari partai Golkar dan PAN yang duduk di DPRD Situbondo agar menemui mereka. Akan tetapi, karena massa pendukung Abdurrahman Wahid terlihat beringas tidak ada satupun para politisi dari kedua partai tersebut yang berani menemui mereka. Akhirnya Ketua DPRD Situbondo keluar menemui massa pendukung Abdurrahman Wahid dan

mengingatkan mereka agar bersikap lebih arif dalam melakukan demonstrasi.

Tidak puas dengan ketidakpedulian para praktisi kedua partai yang duduk di DPRD Situbondo massa kemudian bergerak ke arah alun-alun Situbondo. Sebuah pohon Beringin yang berdiri tegak di tengah alun-alun Situbondo yang dianggap sebagai simbol partai Golkar menjadi sasaran kemarahan massa NU dan dirobohkan. Mereka jengkel kepada DPR-RI yang banyak dikendalikan oleh Akbar Tanjung. Sekitar pukul 08.15, Massa pendukung Abdurrahman Wahid melakukan konvoi di jalan-jalan utama kota. Ketika sampai di Jalan PB. Sudirman dan melihat kantor Kantor DPD Golkar diseberang jalan massa pendukung Abdurrahman Wahid meluruk masuk dan merusaknya. Barang-barang yang ada di kantor partai berlambang pohon beringin itu dikeluarkan ke jalan, kemudian dibakar. Sementara itu, seluruh jendela, atap, dan sebagian dinding gedung dirusak. Sambil meneriakkan gugatan pencabutan memorandum DPR-RI yang diajukan kepada Presiden Gus Dur karena diduga terlibat skandal Bruneigate dan Buloggate, massa pendukung Abdurrahman Wahid kemudian menggantung gambar Akbar Tanjung yang mengenakan kaos Golkar dan menusuk jantungnya. Mereka meneriakkan yel-yel "Bubarkan Golkar! Cabut Memorandum!".

Sejak terjadinya peristiwa pembakaran gedung DPD Golkar di Surabaya situasi sosial politik di daerah Situbondo semakin mencekam. Kepulangan massa NU dan PKB dari aksi demonstrasi di Surabaya dengan membawa ketegangan suasana demonstrasi masih melekat dalam benak mereka dan ini menambah keberanian mereka untuk melakukan aksi-aksi kekerasan lebih lanjut. Kebencian massa NU dan PKB atas perlakuan Akbar Tanjung yang ditengarai sebagai dalang pembentukan Panitia Khusus dan keluarnya memorandum sebagai jalan untuk melengserkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan semakin menambah kejengkelan mereka. Pada

akhirnya massa NU dan PKB menilai bahwa Golkar merupakan sisa-sisa dari rezim Orde Baru yang tidak sesuai dengan masa reformasi.

Dalam suasana yang menegangkan dan mencekam di Situbondo ini menjadi perhatian para politisi di Jakarta, terutama Akbar Tanjung yang partainya menjadi sasaran massa NU. Dia menuntut agar Abdurrahman Wahid menenangkan massanya yang ada di daerah Situbondo. Akbar kecewa dengan sikap Abdurrahman Wahid yang dinilainya tidak mampu menciptakan iklim kondusif belakangan ini. Sebagai presiden Abdurrahman Wahid justru berlaku sebaliknya. "Presiden seharusnya menghormati dan melaksanakan konstitusi, ujar Akbar Tanjung dalam dialog dengan jajaran pers di Gedung Monumen Pers Solo, Jawa Tengah. (Tempo Interaktif, 9, 2, 2001) Akbar mendesak agar Abdurrahman Wahid menenangkan massanya di daerah Situbondo. Hal ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ridwan Hisyam, kepada Abdurrahman Wahid agar datang ke Jawa Timur untuk menenangkan sendiri massa pendukungnya. (Tempo Interaktif, 8, 2, 2001) Abdurrahman Wahid sendiri menyesalkan aksi kekerasan yang dilakukan pendukungnya di daerah Situbondo, setelah Menko Polsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono, melaporkan perkembangan situasi di daerah-daerah ujung timur Pulau Jawa yang semakin buruk. (Tempo Interaktif, 7, 2, 2001)

5.Kesimpulan

Kekerasan sosial yang terjadi di daerah Situbondo lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap panutannya. Sebagai daerah yang berkultur Madura masyarakat Situbondo masih kental dengan corak kehidupan yang mengagungkan tokoh kekhiaian. Bagi masyarakat Situbondo kiai merupakan simbol kepemimpinan yang sangat mereka hormati. Dalam konsep kehidupan masyarakat yang berkultur Madura kiai merupakan bagian dari harga diri masyarakat. Pandangan ini tersirat dalam

semboyan masyarakat, beppak, bebbuk, guru, ratoh (bapak, ibu, guru, penguasa), di mana kiai merupakan guru panutan masyarakat yang paling dihormati. Melecehkan kiai sama artinya dengan melecehkan harga diri mereka. Hal inilah yang menjadi pemicu utama bagi munculnya gerakan protes masyarakat Situbondo.

Perseteruan Abdurrahman Wahid dengan DPR/MPR yang dimulai dengan kebijakan-kebijakan presiden yang dinilai sangat kontroversial dan dilanjutkan dengan tuduhan adanya kasus dugaan korupsi yang melibatkan presiden dianggap masyarakat Situbondo sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol kepemimpinan yang mereka hormati. Abdurrahman Wahid bagi pandangan masyarakat Situbondo tidak saja dianggap sebagai presiden, tetapi juga sebagai kiai yang menjadi panutannya. Hal ini ditambah lagi dengan upaya pendongkolan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan melalui keputusan Sidang Istimewa yang diprakarsai ketua DPR/MPR Akbar Tanjung/Amien Rais secara tidak langsung dianggap masyarakat Situbondo sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol kekiaian yang mereka hormati. Berdasarkan hal tersebut ada korelasi antara perseteruan Abdurrahman Wahid melawan DPR/MPR dengan gerakan protes masyarakat Situbondo, di mana masyarakat memaknai gerakan mereka sebagai bentuk pembelaan akan harga diri mereka atas pelecehan terhadap guru (kiai) yang menjadi panutannya.

Berdasarkan atas konsep pembelaan terhadap harga diri ini masyarakat bergerak menunjukkan kekecewaan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pemicu pelecehan. Oleh karena orang-orang yang dianggap pemicu pelecehan simbol kepemimpinan mereka jauh dari jangkauan mereka, maka masyarakat mengalihkan sasaran kekecewaannya terhadap lembaga atau sarana dan prasarana yang dianggap sebagai representasi dari orang-orang yang melecehkan. Gerakan protes masyarakat Situbondo ini dimulai dengan penggalangan massa dan mengirimkan ke

Surabaya untuk berpartisipasi dalam menuntut pembubaran panitia khusus Bulogate dan Bruneigate yang dinilai melecehkan kekiaian Abdurrahman Wahid. Demonstrasi ini berlangsung hingga terjadi insiden pembakaran gedung DPC Golkar di Surabaya oleh massa demonstran. Pasca terjadinya insiden pembakaran gedung DPC Golkar suhu politik di pusat semakin memuncak dan pihak Golkar yang diwakili ketua DPR Akbar Tanjung menuntut Abdurrahman Wahid untuk bertanggung jawab. Perseteruan semakin melebar hingga muncul memorandum I dan II. Hal ini semakin memperkuat kejengkelan massa di Situbondo atas arogansi ketua DPR Akbar Tanjung. Hal ini kemudian memicu gerakan "tumpas kelor" yaitu menumpas habis partai Golkar yang dianggap sebagai representasi dari rezim Orde Baru. Gerakan ini kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain di Jawa Timur.

Kejengkelan masyarakat Situbondo semakin memuncak ketika mendengar issue adanya Sidang Istimewa yang mengarah pada penurunan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Mereka menilai SI sebagai bentuk pengkhianatan ketua MPR, Amien Rais terhadap janji yang diberikan kepada Kiai Faqih. Massa kembali bergejolak dengan semakin santernya issue SI yang ingin mendongkel Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Masyarakat akhirnya berkumpul di Ponpes Salafiah Safiiah dan menggelar tanda tangan di atas kain sepanjang sebagai bentuk penolakan adanya SI dan dipajang di pinggir jalan raya Pantai Utara. Tidak puas dengan itu massa kemudian menumpahkan kejengkelannya dengan memotong pohon-pohon di pinggir jalan dan memutuskan jalur yang menghubungkan Surabaya-Banyuwangi.

Akibatnya jalur darat pantai utara terputus dengan daerah-daerah lain selama berhari-hari, sehingga perekonomian di daerah sekitar jalur pantai utara mengalami kelumpuhan. Sebagai bentuk kejengkelannya massa menghancurkan gedung-gedung dan institusi milik

Muhammadiyah yang menjadi representasi Amien Rais.

Situbondo merupakan salah satu wilayah yang menjadi daerah kantong kaum nahdhiyin. Kultur Madura menjadi bagian dari kehidupan masyarakat ini. Kepercayaan masyarakat terhadap kiai merupakan salah satu karakteristik dalam masyarakat Situbondo dan hal ini menjadi penentu bagi berakhirnya gerakan protes yang dilakukan oleh masyarakat. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali Kiai Fawa'id As'ad yang menjadi panutan masyarakat Situbondo turun untuk menghentikan tindak kekerasan. Suhu ketegangan sosial di daerah ini menurun dengan adanya seruan Kiai Fawa'id As'ad yang menenangkan massa. Secara tidak langsung seruan Kiai Fawa'id As'ad ini mengakhiri gerakan protes masyarakat Situbondo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Latief Wiyata, "Manusia Madura: Pandangan Hidup, Prilaku dan Etos Kerja", dalam Ayu Sutarto, Setya Yuwana Sudikan (ed.), Pemetaan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur; Sebuah Upaya Pencarian Nilai-Nilai Positif (Jember: Biro Mental Propinsi dan Kompyawisda Jatim, 2008).

Budiman, Arief dan Olle Tornquist, Aktor Demokrasi Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia, (Yogyakarta, ISAI, 2001).

Greg Barton, Biografi Gus Dur (Yogyakarta: LkiS, 2010) Nur Khalik Ridwan, NU & Bangsa 1914-2010; Pergulatan Politik & Kekuasaan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).

J.F Conceicao, Indonesia's Six Years of Living Dangerously, (Singapore: Horizon Books, 2005).

Kuntowijoyo, Radikalisme Petani, (Yogyakarta : Benteng Intervisi Utama, 1993).

Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).

Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Terj. Nugroho Notosusanto), (Jakarta: UI Press, 1986).

M. AS Hikam (dkk.), Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 1999).

Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Suatu Alternatif, (Jakarta: Gramedia, 1982).

Sinansari Ecip, Kronologi Situasi Penggulingan Soeharto, (Bandung; Mizan, 1998).

KORAN DAN MAJALAH

Kompas, "Laporan Akhir Tahun Bidang Ekonomi, Krisis Ekonomi 1998, Tragedi tak Terlupakan", 21 Desember 2000.

Majalah Tempo, "Pendukung Gus Dur Minta Pansus Bulog Dibubarkan", 26 Januari 2001.

Majalah Tempo, "Amien Rais Optimis SI Dipercepat", 10 Februari 2001.

Majalah Tempo, "Dibalik Lengsernya Gus Dur", 1 Agustus 2001.

Tempo Interaktif, "Aksi Masyarakat Situbondo Blokir Jalanan", 3 Februari 2001.

Tempo Interaktif, "Akbar Kecewa Dengan Sikap Gus Dur," 9 Februari 2001.